**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TAHUN 2019 (Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji)**

**Oleh**

**Faeruz H**

**NIM 188010054**

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik**

**Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia**

Ibadah Haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang luar biasa, peristiwa akbar yang ditunjukan oleh sang Pencipta kepada seluruh hambanya dalam ibadah haji tidak ada perbedaan antara kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, bahkan perbedaan warna kulit. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang dilaksanakan disebuah tanah yang suci dimana Allah SWT memberikan sebuah tempat bagi orang-orang yang muslim untuk melaksanakan tawaf dan beribadah yang lainya

Permasalahan pokok dalam penelitian ini Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2019 (Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang di harapkan. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini di rasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, berkaitan dengan kebijakan yang meliputi aspek kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara Ibadah Haji baik tentang pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 dan perubahan undang-undang No 8 tahun 2019, belum semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan kewajiban, karena selama ini pemerintah hanya mengurusi yang sifatnya administratif semata. Sehingga masih ada yang ter bengkalai seperti pembinaan (manasik haji, Pelayanan yang masih rumit harus kesana kemari, dan perlindungan Jemaah di Arab Saudi

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji

*ABSTRACT*

 *Hajj is an extraordinary religious phenomenon, a grand event that is shown by the Creator to all his servants in the pilgrimage, there is no difference between caste and ethnicity, no gender discrimination, even differences in skin color. Hajj is the fifth pillar of Islam which is carried out in a holy land where Allah SWT has provided a place for Muslim people to carry out tawaf and other worship.*

 *The main problem in this research is the Implementation of Hajj Implementation Policy at the Ministry of Religion of the City of Bandung in 2019 (Based on the Laws and Regulations concerning the Implementation of Hajj)*

 *The research method used in this research is descriptive analysis with this type of research is qualitative. The qualitative approach was chosen with the consideration that this method is expected to obtain real data and be able to examine research problems in depth so that the expected results can be obtained. The use of this qualitative research approach is felt to be very appropriate in the study of public administration.*

 *Based on the results of the research, the implementation of the Hajj Implementation Policy at the Ministry of Religion of the City of Bandung has not been fully optimal, with regard to policies covering aspects of policies carried out by Hajj organizers regarding services, guidance and protection for Indonesian pilgrims listed in Law No. 13 2008 and the amendments to law No. 8 of 2019, not all of them are the responsibility of the government in carrying out its obligations, because so far the government has only taken care of those that are administrative in nature. So that there are still things that are neglected such as guidance (Hajj rituals, services that are still complicated to get here and there, and the protection of pilgrims in Saudi Arabia)*

 *Keywords: Implementation, Hajj Implementation Policy*

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, moeslim, 2009. Bersujud Di Baitullah. Ibadah Haji Mencari Keselamatan Hidup. Jakarta : Kompas.

Anderson, J. E. 1979. *Publik Policy Making. An Introduction, Buston: Houghton Mifflin Company.*

Bruinessen, Martin Van, 1999, Mencari Ilmu dan Pahala Di Tanah Suci : Orang Nusantara Naik Haji. Jakarta : INIS.

Darwis, 2005. Ibadah Haji dalam Sorotan. Bandung : Ar-Rahmah.

Douwea, Dick and Kaptein, Nico, 1997. Indonesia dan Haji. Jakarta : INIS

Dunsire, Andrew. 1978. *Implementasi in Bereaucracy. Merlin Tobertson.*

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Publik Policy*. Washington Congressional Quarterly Inc.

Hanan, A Latief dan Acmad Nidjam. 2006. Manajemen Haji. Jakarta : Mediacita

Handoko, Hani T. 1986. Manajemen. Yogyakarta : BPFE

Islamy, Irfan M. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara.

Jones, Charles O. 1984. Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan). Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Kerlinger, Fred.N. 1998 Azas-azas Penelitian Behavioral, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Kementrian Agama, 2006. Panduan Perjalanan Haji. Jakarta : Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh.

Linden, Russel M. 2002. *Working Across Boundaries. Jossey A Wiley Imprant.*

Loir, Hanry Chambert. 2013. Naik Haji Di Masa Silam. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.

Mustopadidjadja. 2009. Kebijakan Administrasi Negara. Jakarta : LAN-RI

Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nigro, Felix A. And Nigro, Lioyd G. 1977. *Modern Public Administrastion.* California : Harper and Row.

Nusution, S. 1987. Metode Research. Bandung : Jemars

Satibi, Iwan. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis &nDisertasi.* Bandung : Ceplas

Sedarmayanti, 2003. Good Governance (kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. CV. Mandar Maju. Bandung.

Shariati, Ali, 2009. Rahasia Haji : Berjumpa Allah Di Ka’bah Hati. (Diterjemahkan dari The Hajj).

Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara

Smith, Thomas B. 2010. The Policy Implementation Process. Elsevier Scientific Publising Compeny, Amsterdam : Springger.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alphabeta.

Suryadi, soleh. 2007. Administrasi Publik & Otonomi daerah, Bandung : Prisma Press.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2009. Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP 3 ES.

Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara

Suryadi, soleh. 2007. Administrasi Publik & Otonomi daerah, Bandung : Prisma Press.

Sugiyo. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sutisnawidjaja, Tjahjo dan Yaya Mulyana A. Azis. 2016. *Panduan Akademik dan Penulisan Tesis*. Bandung : LEMLIT UNPAS Press.

**Dokumen :**

Muhamad Labolo. 2011. Implementasi Kabijakan Pelimpahan Urusan Haji Dari Pemerintah Kapada Pemerintah Daerah (Studi Pada Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Bandung : UNPAD

Sudirman. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung (digilib.unila.ac.id)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-undang.